

Daftar Pustaka

Abdul, Wahab Solichin. 2001 "*Analisis kebijakan, bumi aksara*". Jakarta.

Davey, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah : *Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI-Press.

Dwiyanto Agus dkk 2002.: *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Gaffar, H. Affan . *Policy process an Formulation*. Modul I Program MPA Dikutip dari Judul skripsi: Implementasi Perda 17 Tahun 2002 Kota Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat

Nugroho, Riant, Dwijowijoto, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Supriyadi Dedi, Brantakusuma ph D 2002. "*Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*". Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.

S. Bogdan. Robert & Knopke Sari Biklen. (Boston : Allyn and Bacon, 1982), *Qualitative research for education an introduction to theory and methods*

Thoah, Miftah. 1993. *Dimensi- dimensi prima Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali press.

Wibawa Samudra. 1991. *kebijakan public dan Analisa*. Jakarta: intermedia.

Winarno Budi. 2002 *Kebijakan Publik (.Teori, proses, dan studi kasus*. Media pressindo

Yani, Ahmad . 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Website

Alipuddin M - FISIPOL (Ilmu Pemerintahan), 2011 - publikasi.umy.ac.id. Diakses pada tanggal 8 juli 2013 dari <http://publikasi.umy.ac.id/index.Ilmu Pemerintahan>

Ilyas, Moh, Agumo, Purwo : Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2006, (Dikutip dari judul skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Publik). Di akses pada tanggal

18 juni 2013 dari : [http://elisa1.ugm.ac.id/septianto_syafari_hari_Definisi Kebijakan Publik.pdf](http://elisa1.ugm.ac.id/septianto_syafari_hari_Definisi_Kebijakan_Publik.pdf)

Juru Parkir Ilegal Masih Marak. Diakses pada tanggal 8 juli 2013 dari : http://www.jogjainfo.net/2011/05/juru_parkir_ilegal_masih-marak.html.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Diakses pada tanggal 15 juli 2013 dari : www.dephub.go.id

Suryo, (Dikutip dari Proposal Sejauh mana dampak parkir liar terhadap PAD Kota Yogyakarta). Diakses pada tanggal 26 july 2013 dari : http://suryo.webs.com/proposal_resmi.docx

Sutomo, Heru. *Permasalahan Parkir Jogja*: Kompas 9 April 2012. diakses pada tanggal 20 November 2013

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002 diakses pada tanggal 19 juni 2013 dari : http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_abdul-choliq.ps

Tarif Parkir di Jogja Diseragamkan, Diakses pada tanggal 30 mei 2013 dari http://revisi.joglosemar.co/berita_tarif_parkir_dijogja_diseragamkan.html

Waskitho: *pengembangan kawasan trading perdagangan dimalioboro* diakses pada tanggal 13 oktober 2013

WebSite Pemerintahan Kota Jogja. Diakses pada tanggal 19 juni 2013 dari : www.jogjakota.go.id

Zulkifli M. (2011) *Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 26 july 2013 dari : http://www.thedigilib.com/doc/implementasi_kebijakan_parkir_ditepi_jalan_umum_dikota_yogyakarta.

Peraturan - peraturan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 -
2016

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-
2011

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2008. Tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah